

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil yang mulai memperhatikan risiko keselamatan dan kesehatan para tenaga kerjanya. Risiko seperti timbulnya penyakit akibat lingkungan tempat kerja yang kurang sehat maupun kejadian kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, baik saat berada di lingkungan tempat kerja maupun diluar lingkungan tempat kerja (berangkat kerja, pulang kerja atau dinas luar kota). Untuk mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi, setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang berada di bawah naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1992, pada prinsipnya jaminan sosial tenaga kerja merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang mempunyai hubungan industrial) beserta keluarganya. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang mekanisme penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Jaminan sosial sangat penting dimiliki oleh seluruh pekerja di Indonesia. Karena risiko sosial ekonomi itu dapat terjadi kapan saja, dimana saja, dan kepada siapa saja. Risiko sosial ekonomi yang dimaksud itu seperti kecelakaan dan kematian, sehingga perlu ada satu alat pengaman, agar pada saat terjadi risiko sosial ekonomi tersebut, tidak akan mengganggu kesejahteraan secara drastis. Berdasarkan

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan diamanatkan untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Dari tahun ke tahun jumlah tenaga kerja di Indonesia semakin meningkat, berbanding lurus dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang terus meningkat setiap tahunnya, baik peserta aktif maupun non-aktif. Berikut tabel perkembangan jumlah tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dalam periode tahun 2015 – 2018 :

Tabel 1.1 Jumlah Kepesertaan Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan
Periode 2015-2018

Peserta	2015	2016	2017	2018
Aktif	19,2 juta	22,6 juta	25,4 juta	30,5 juta
Non-Aktif	17,8 juta	18,3 juta	18,8 juta	20,2 juta
Total	37 juta	40,9 juta	44,2 juta	50,7 juta

Sumber : BPJS Ketenagakerjaan, 2019

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa jumlah peserta tenaga kerja aktif setiap tahunnya mengalami peningkatan. Begitu juga dengan jumlah peserta tenaga kerja non-aktif yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan adanya kesadaran tinggi dari perusahaan dan pekerja mengenai risiko-risiko yang mungkin terjadi seperti kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja atau secara tiba-tiba, yang terjadi diluar kendali atau kontrol manusia. Banyak faktor yang mendasari terjadinya kecelakaan kerja, seperti kebakaran, keracunan bahan kimia, kerusakan mesin, kecelakaan lalu lintas pada saat akan pergi bekerja, kecelakaan di lokasi kerja, dan lain-lain.

Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, maka dibutuhkan asuransi sosial. Asuransi sosial merupakan asuransi yang menyediakan jaminan sosial bagi para tenaga kerja dan masyarakat umum, karena menyangkut kepentingan dan hak masyarakat, melalui peraturan perundang-undangan pemerintah menetapkan asuransi sosial sebagai asuransi wajib, dimana setiap masyarakat yang terlibat dalam asuransi ini memiliki kewajiban untuk membayar iuran atau premi dan mendapatkan jaminan sosial. Pemerintah menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan asuransi sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terbagi menjadi dua, yaitu BPJS Kesehatan yang menggantikan PT. Askes dan BPJS Ketenagakerjaan yang menggantikan PT. Jamsostek.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dimana programnya wajib diikuti oleh setiap orang baik pemberi kerja maupun tenaga kerjanya, termasuk tenaga kerja asing yang paling singkat 6 (enam) bulan bekerja di Indonesia, PNS, anggota TNI & POLRI, pejabat negara, pegawai pemerintahan, non pegawai, dan lain-lain. Produk dan layanan yang tersedia di BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), Program Perlindungan Pahlawan Devisa (TKI). Peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari 4 (empat) kelompok berdasar jenis pekerjaannya, yaitu Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia.

Salah satu program layanan unggulan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki jumlah peserta paling banyak yaitu Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015, Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, baik pada saat mulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit yang disebabkan lingkungan kerja atau berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim pada tahun 2018 sebesar Rp 1,2 triliun untuk 173.000 kasus, dimana angka tersebut lebih tinggi dari tahun 2017. Ditahun 2017 BPJS Ketenagakerjaan hanya membayarkan klaim sebesar Rp 971,6 miliar dengan 123.000 kasus.

Salah satu peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya tersebut yang meliputi: Pemberi kerja; Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja yang bukan menerima upah, contohnya tukang ojek, supir angkot, pedagang keliling, dokter, pengacara / advokat, artis, dan lain-lain.

Dalam pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh peserta. Prosedur pengajuan klaim dan pembayaran yang telah ditetapkan dibuat semudah mungkin agar peserta jaminan baik perusahaan maupun tenaga kerja tidak mengalami kesulitan. Terdapat dua tahap dalam pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Tahap I yaitu proses pelaporan terjadinya kecelakaan kerja oleh perusahaan dan Tahap II yaitu pengajuan santunan/manfaat setelah dipastikan laporan kecelakaan pada Tahap I merupakan kecelakaan kerja.

Pentingnya prosedur pengajuan klaim agar tidak terjadi kesalahan dalam pengajuan klaim maka dibuatlah sebuah prosedur yang mudah. Hal tersebut bertujuan untuk memberi kepuasan bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga diharapkan peserta BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan dan pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) secara lebih mendetail. Karena alasan tersebut yang mendasari penulis untuk melakukan praktik kegiatan lapangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap dengan mengambil judul **“PROSEDUR PENGAJUAN PENETAPAN DAN PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CILACAP”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Cilacap?

2. Bagaimana prosedur penetapan jaminan dan perhitungan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Cilacap?
3. Bagaimana prosedur pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi Pekerja Bukan Penerima Upah di BPJS Ketenagakerjaan Cilacap?

C. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud dari kegiatan praktik kerja lapangan adalah sebagai berikut :
 - a. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat PKL.
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk menyusun Tugas Akhir.
 - c. Mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja dan untuk menambah ilmu pengetahuan yang tidak dapat di bangku perkuliahan.
2. Adapun tujuan dari kegiatan praktik kerja lapangan sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan klaim hingga pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan santunan atau manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
 - c. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesional mahasiswa untuk memasuki dunia kerja.

3. Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Untuk melengkapi persyaratan dan menyelesaikan studi pada program studi Akuntansi Diploma 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana prosedur pengajuan klaim dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Cilacap.

b. Bagi BPJS Ketenagakerjaan.

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat di jadikan sebagai pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dimasa sekarang maupun yang akan datang dan informasi yang dituliskan dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi prosedur pengajuan klaim dan pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

c. Bagi Pihak Akademis

Untuk menambah informasi dan menjadi suatu referensi untuk menambah wawasan serta dapat menjadi acuan dalam penyusunan Tugas Akhir.

D. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, untuk memudahkan penyusunan dan menghindari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup hanya meliputi informasi tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
2. Informasi yang disajikan yaitu : prosedur dan syarat-syarat pengajuan, penetapan jaminan dan rumus-rumus menghitung santunan, serta prosedur pembayaran klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, ada beberapa metode yang di gunakan antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui sumber asli secara langsung yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Metode yang digunakan yaitu metode interview dengan mengadakan wawancara kepada salah satu karyawan yaitu dengan memberikan pertanyaan tentang bagaimana prosedur pengajuan klaim hingga pembayaran klaim jaminan di BPJS Ketenagakerjaan Cilacap.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang dapat membantu proses penyusunan laporan. Metode yang digunakan yaitu metode studi pustaka, dengan mendapatkan data yang telah tersedia dari beberapa buku di perpustakaan, dokumen arsip milik BPJS Ketenagakerjaan, dan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

1. Tahap Persiapan
 - a. Pencarian dan pengurusan perijinan tempat PKL
 - b. Menentukan perusahaan yang akan dijadikan objek laporan yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cilacap.
 - c. Pengajuan judul Tugas Akhir.
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Jadwal Pelaksanaan
Tempat : BPJS Ketenagakerjaan
Bagian : Kearsipan (Bidang SDM dan Umum)
Waktu : 18 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019.
 - b. Minggu I
 - 1) Menginput dan mengarsipkan voucher jaminan bulan Juli tahun 2018.

- 2) Mempelajari sejarah perkembangan termasuk visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap.

c. Minggu II

- 1) Mencari data dan informasi tentang struktur organisasi dan dokumen petunjuk teknis Program JKK, JHT, JP, dan JK.
- 2) Menginput dan mengarsipkan voucher jaminan bulan Oktober tahun 2018.

d. Minggu III

- 1) Melakukan wawancara langsung kepada salah satu karyawan BPJS Ketenagakerjaan Cilacap untuk mendapatkan informasi secara langsung.
- 2) Menginput dan mengarsipkan voucher jaminan bulan November tahun 2018.

e. Minggu IV

- 1) Menyortir surat dinas dan produk hukum tahun 2017 berdasarkan jenis perihalnya.
- 2) Mengurutkan surat dinas tersebut berdasarkan bulan dan tanggal surat.
- 3) Menginput surat dinas dan produk hukum tahun 2017.

f. Minggu V

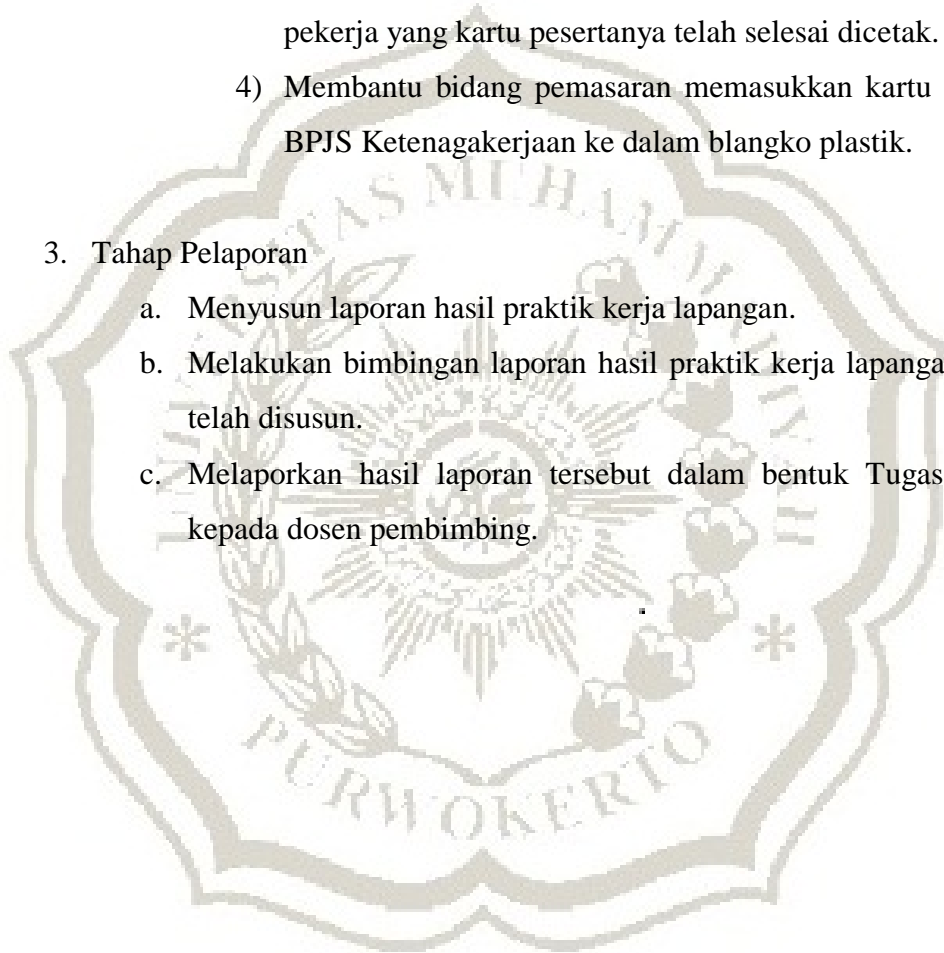
- 1) Menginput dan mengarsipkan voucher jaminan bulan Januari, April, Juli, dan Oktober tahun 2005.
- 2) Mencari contoh form pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan contoh brosur dari produk-produk BPJS Ketenagakerjaan.

g. Minggu VI

- 1) Mengurutkan dan menginput dokumen perusahaan jasa konstruksi bulan September, Oktober, dan Desember tahun 2017.
- 2) Memberikan indeks berupa nomor NPP Badan Usaha pada map arsip.
- 3) Membantu bidang pemasaran menginput nomor KPJ pekerja yang kartu pesertanya telah selesai dicetak.
- 4) Membantu bidang pemasaran memasukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan ke dalam blangko plastik.

3. Tahap Pelaporan

- a. Menyusun laporan hasil praktik kerja lapangan.
- b. Melakukan bimbingan laporan hasil praktik kerja lapangan yang telah disusun.
- c. Melaporkan hasil laporan tersebut dalam bentuk Tugas Akhir kepada dosen pembimbing.



Tabel 1.2 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	Januari				Maret				April				Mei				Juni				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Tahap Persiapan																					
	a. Pencarian dan pengurusan perijinan tempat PKL		✓																			
	b. Menentukan perusahaan yang akan dijadikan objek laporan yaitu BPJS Ketenagakerjaan Cilacap			✓																		
	c. Pengajuan judul Tugas Akhir					✓																
2.	Tahap Pelaksanaan																					
	a. Menginput dan mengarsipkan voucher jaminan bulan Juli tahun 2018.		*					✓														
	b. Mempelajari sejarah perkembangan termasuk visi dan misi BPJS Ketenagakerjaan Cilacap.							✓														
	c. Mencari data dan informasi tentang struktur organisasi dan dokumen petunjuk teknis Program JKK, JHT, JP, dan JK.								✓													

	April, Juli, dan Oktober tahun 2005.																			
k.	Mencari contoh form pengajuan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja dan contoh brosur dari produk-produk BPJS Ketenagakerjaan									✓										
l.	Mengurutkan dan menginput dokumen perusahaan jasa konstruksi bulan September, Oktober, dan Desember tahun 2017.										✓									
m.	Memberikan indeks berupa nomor NPP Badan Usaha pada map.										✓									
n.	Membantu bidang pemasaran menginput nomor KPJ pekerja yang kartu pesertanya telah selesai dicetak.										✓									
o.	Membantu bidang pemasaran memasukkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan ke dalam blangko plastik.										✓									

